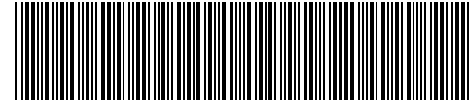




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408759/2021**



DS:2201-1496-9107-3557

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : (05) | JAWA TIMUR |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408759) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA |
| Sebesar | : Rp. | 7.179.975.000 (TUJUH MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	7.179.975.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN SURABAYA II | (135) Rp. | 7.179.975.000 |
|---------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2021



DS:2201-1496-9107-3557

Satker : (408759) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	110.491.000
BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	110.491.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	7.069.484.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	7.069.484.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2201-1496-9107-3557

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			110.491.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			110.491.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	110.491.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	110.491.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			7.069.484.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			7.069.484.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5,00	Lembaga	108.817.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	Lembaga	108.817.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12,00	Kelompok Masyarakat	187.500.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	75.880.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	111.620.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2201-1496-9107-3557

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		61,00	Lembaga	96.847.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum		61,00	Lembaga	96.847.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		61,00	Lembaga	100.000.000
Rincian Output		:	01 PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	(PN)	61,00	Lembaga	100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		694,00	Orang	5.552.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	694,00	Orang	5.552.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		96,00	Kelompok Masyarakat	1.024.320.000
Rincian Output		:	01 QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	96,00	Kelompok Masyarakat	1.024.320.000

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

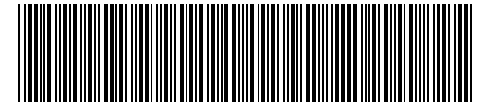
ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2021

I B. SUMBER DANA



DS:2201-1496-9107-3557

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (408759) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	7.179.975.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	7.179.975.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2201-1496-9107-3557

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408759	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	-	7.176.375	3.600	-	-	7.179.975		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	110.491	-	-	-	110.491		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	110.491	-	-	-	110.491		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	110.491	-	-	-	110.491	05 . 51	
01	RM	-	110.491	-	-	-	110.491	135	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	7.065.884	3.600	-	-	7.069.484		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	7.065.884	3.600	-	-	7.069.484		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	105.217	3.600	-	-	108.817	05 . 51	
01	RM	-	105.217	3.600	-	-	108.817	135	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	187.500	-	-	-	187.500	05 . 51	
01	RM	-	187.500	-	-	-	187.500	135	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2201-1496-9107-3557

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	96.847	-	-	-	96.847	05 . 51	
01	RM	-	96.847	-	-	-	96.847	135	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	100.000	-	-	-	100.000	05 . 51	
01	RM	-	100.000	-	-	-	100.000	135	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	5.552.000	-	-	-	5.552.000	05 . 51	
01	RM	-	5.552.000	-	-	-	5.552.000	135	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	1.024.320	-	-	-	1.024.320	05 . 51	
01	RM	-	1.024.320	-	-	-	1.024.320	135	
JUMLAH		-	7.176.375	3.600	-	-	7.179.975		

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2201-1496-9107-3557

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408759	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	57.833	60.333	102.873	105.333	133.733	131.333	134.833	128.833	119.413	115.633	111.833	5.977.992	7.179.975
		BELANJA BARANG	57.833	60.333	102.522	104.866	133.266	130.749	134.366	128.366	118.946	115.516	111.716	5.977.897	7.176.375
		BELANJA MODAL	0	0	351	467	467	584	467	467	467	117	117	95	3.600
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	0	12.540	8.000	17.400	9.500	11.500	13.000	9.580	11.800	10.500	6.671	110.491
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	12.540	8.000	17.400	9.500	11.500	13.000	9.580	11.800	10.500	6.671	110.491
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	57.833	60.333	90.333	97.333	116.333	121.833	123.333	115.833	109.833	103.833	101.333	5.971.321	7.069.484
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	57.833	60.333	89.982	96.866	115.866	121.249	122.866	115.366	109.366	103.716	101.216	5.971.226	7.065.884
		53 BELANJA MODAL	0	0	351	467	467	584	467	467	467	117	117	95	3.600

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2021
IV A. B L O K I R**



DS:2201-1496-9107-3557

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408759] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

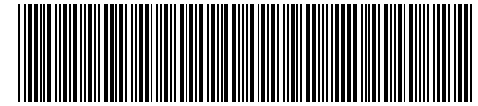
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:2201-1496-9107-3557

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408759] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003